

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara mengatur terkait batas dan cara-cara sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama. Dengan hal tersebut, negara mampu akan mampu untuk menyatukan dan mengatur kegiatan sosial penduduknya ke arah tujuan yang sama.¹

Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara, maka ada beberapa unsur yang diperlukan, yaitu adanya penduduk, wilayah, pemerintahan yang berkuasa serta kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan bangsa lain.² Salah satu unsur penting yang telah disebutkan tersebut adalah pemerintah. Pemerintah merupakan unsur negara yang memegang peranan penting dalam mengelola segala urusan kepentingan umum, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur warga negara dalam menjalankan kehidupannya.³

Dari sekian banyaknya bentuk pemerintahan di berbagai negara, konsep kekuasaan suatu negara tentu saja memiliki perbedaan dengan negara lainnya. Bentuk-bentuk kekuasaan dalam lingkaran politik dan pemerintahan yang

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 46-47.

² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 37-38.

³ Hafied Cangara, *ibid.*, hlm. 38.

dijalankan oleh penguasa diantaranya terdiri dari bentuk pemerintahan otoriter, demokratis dan monarki. Kekuasaan otoriter merupakan model kepemimpinan yang dominan, dimana kebijakannya dipegang oleh satu orang yang bersifat sewenang-wenang. Kekuasaan demokratis adalah sistem pemerintahan yang didalamnya terdapat keseimbangan antara penguasa dan rakyat. Sedangkan kekuasaan monarki yaitu sistem pemerintahan yang kebijakannya dipegang oleh seorang raja yang tercipta atas dasar keturunan, bukan kehendak rakyat.⁴ Diantara ketiga bentuk kekuasaan tersebut, bentuk demokrasi adalah sistem yang paling dekat untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan keinginan penguasa. Demokrasi sendiri adalah bentuk kekuasaan, dimana rakyat memiliki hak dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan.⁵

Demokrasi secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “*demos*” yang artinya rakyat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi berarti adalah sebuah sistem dalam menjalankan pemerintahan, dimana kedaulatannya berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari adanya pemikiran tentang hubungan antara negara dan hukum di wilayah Yunani kuno. Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktikkan dalam kehidupan bersifat langsung, dimana rakyat berhak membuat keputusan politik secara langsung berdasarkan prosedur yang telah disepakati. Demokrasi langsung ini mampu diselenggarakan secara efektif karena saat itu

⁴ Udang A. Kamaludin & Muhammad Alfian, *Dinamika Politik di Indonesia: Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 21.

⁵ Thomas T. Pureklolon, *Demokrasi dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan Sosial, Budaya, dan Pancasila*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 1.

jumlah penduduk di Negara kota Yunani hanya berjumlah 400.000 jiwa, dan sebagian diantaranya tidak memiliki hak memilih untuk melaksanakan demokrasi langsung tersebut. Hal itu karena hanya warga Negara resmi yang boleh menerapkan demokrasi langsung kecuali budak, perempuan dan anak-anak.⁶

Dalam perkembangannya, ketika bangsa Yunani berhasil dikalahkan oleh Romawi, maka pelaksanaan demokrasi lenyap, karena bangsa Eropa pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan raja dan gereja. Kemudian pada sekitar abad ke-14 Masehi, demokrasi kembali muncul di Eropa yang didorong oleh terjadinya renaissance dan reformasi. Melihat bagaimana buruknya kondisi pemerintahan pada abad pertengahan memunculkan tercetusnya gagasan untuk memisahkan kekuasaan yang beriringan dengan lahirnya ajaran demokrasi.⁷ Sistem demokrasi ini pada kemudian hari diterapkan di banyak Negara, salah satunya adalah Indonesia.

Bangsa Indonesia sendiri memiliki sejarah yang panjang untuk mencapai kemerdekaan. Begitu berat perjuangan yang dilakukan rakyat pribumi dalam upaya mencapai kemerdekaan tersebut, hingga pada akhirnya, perjuangan mereka membuahkan hasil, yaitu dengan merdekanya bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, setelah Indonesia berhasil menjadi negara yang merdeka, gagasan demokrasi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia mendapat tempat yang sangat penting.

⁶ Yoyoh Rohaniah & Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 265.

⁷ Yoyoh Rohaniah & Efriza, *ibid.*, hlm. 265-266.

Untuk dapat dikatakan sebagai negara demokrasi, suatu negara harus melaksanakan dua asas pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, serta pengakuan terhadap hakikat dan martabat manusia.⁸ Sebagai sebuah negara demokrasi, bangsa Indonesia juga memenuhi gagasan pokok tersebut, salah satu bukti nyatanya adalah adanya pelaksanaan pemilu di Indonesia yang telah dilakukan sejak lama.

Pemilu merupakan kegiatan paling penting dalam rangka mewujudkan demokrasi. Pemilu sendiri merupakan sebuah kegiatan dimana rakyat akan memilih pemimpin, baik perorangan atau kelompok. Biasanya, orang yang dipilih oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam pemerintahan adalah mereka yang sudah dicalonkan oleh partai politik. Partai politik merupakan suatu organisasi politik yang terbentuk karena adanya persamaan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara melalui pelaksanaan pemilihan umum.⁹

Di Indonesia, keberadaan parpol sudah ada sejak masa kolonial. Hal tersebut menjadi tanda akan bangkitnya kesadaran nasional rakyat pribumi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda inilah di Hindia Belanda didirikan *volksraad*¹⁰, dan pada masa beberapa partai politik dan organisasi bergerak. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat pelarangan terhadap keberadaan partai politik, kecuali hanya golongan-golongan Islam. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia Drs. Moh.

⁸ Thomas T. Pureklolon, *op. cit.*, hlm. 2.

⁹ UU No. 31 Tahun 2002.

¹⁰ Volksraad merupakan dewan perwakilan rakyat yang ada pada masa Hindia Belanda, untuk memberikan nasihat kepada Gubernur Jendral.

Hatta akhirnya menandatangani maklumat yang berisi anjuran tentang pembentukan partai politik, yang mengakibatkan banyak munculnya partai baru dengan latar belakang ideologi yang berbeda-beda.¹¹

Dalam sejarahnya, Negara Indonesia telah melaksanakan proses pemilihan umum yang pertama kalinya pada tahun 1955. Namun pada pemilu pertama ini, pemilu hanya untuk memilih Anggota DPR dan Dewan Konstituante, sedangkan Presiden diangkat oleh MPR.¹² Pelaksanaan pemilu 1955 sendiri tidak hanya diikuti oleh partai politik, namun juga diikuti oleh organisasi kemasyarakatan dan juga perorangan.

Pelaksanaan pemilu yang harusnya kembali dilaksanakan pada tahun 1960 ternyata tidak dapat dilakukan. Hal tersebut terjadi karena pemerintahan baru setelah dekrit 5 Juli 1959 tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melaksanakan pemilu. Setelah itu, Presiden juga membubarkan DPR hasil dari pemilu 1955 pada 4 Juni 1960. Adanya pembubaran DPR tersebut terjadi karena pihak DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Untuk mengganti DPR tersebut, maka Presiden mengangkat sendiri anggota MPRS dan DPR dengan sebutan DPR-GR. Sejak saat itu, kekuasaan Negara menjadi tersentral di bawah kekuasaan Presiden, dan hingga akhirnya membuat ketetapan untuk mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.¹³

¹¹ Cecep Suryana, *Selayang Pandang Partai Politik*. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm. 5-6.

¹² KPU, Modul I Pemilih Pemula, hlm. 13.

¹³ Ibnu Tri Cahyono, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: In –Trans Publishing, 2009), hlm. 27.

Adanya pemusatan kekuasaan di bawah wewenang Presiden menyulitkan terjadinya stabilitas pemerintahan. Presiden banyak melakukan perombakan terhadap cabinet yang ada, hingga terbentuklah cabinet dwikora pada 27 Agustus 1964. Kemudian, terjadinya peristiwa G30S menyebabkan situasi politik di Indonesia semakin rumit dan menghendaki adanya pembaruan politik dan ekonomi. Banyak tuntutan yang dirahkan kepada Presiden, sehingga membuat presiden membubarkan cabinet Dwikora dan menyusun Kabinet 100 Menteri. Pada kenyataannya, pembentukan cabinet 100 menteri itu tidak berhasil memperbaiki keadaan ekonomi maupun politik Indonesia.¹⁴ Kemudian, muncul tuntutan rakyat yang dipelopori oleh angkatan 66, yang pada akhirnya membuat Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah mandat yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966.

Dalam menghadapi kondisi yang kacau ini, MPRS kemudian mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang berisi tentang pencabutan kekuasaan dari presiden Soekarno. Dengan dicabutnya jabatan presiden dari Soekarno, maka kekuasaan dimandatkan kepada Soeharto dengan menetapkan Jendral Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia.¹⁵ Diangkatnya Soeharto sebagai presiden menandakan bahwa pemerintahan orde lama sudah berakhir dan muncullah era orde baru. Akhirnya pada tahun 1971, pemilu kedua dapat dilaksanakan meskipun pada kenyataannya MPRS telah memerintahkan pelaksanaan pemilu pada tahun 1968. Setelah pemilu kedua dilaksanakan pada 1971, pemerintah kemudian melakukan penyederhanaan partai politik.¹⁶

¹⁴ Ibnu Tri Cahyono, *ibid.*, hlm. 27.

¹⁵ Udang A. Kamaludin & Muhammad Alfian, *loc. cit.*, hlm. 103-105.

¹⁶ Udang A. Kamaludin & Muhammad Alfian, *ibid.*

Pada akhirnya, di era orde baru saat itu hanya terdapat 2 parpol dan 1 Golongan Karya. Ketiga kekuatan politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan hasil fusi dari parta-partai yang beraliran Islam. Partai kedua yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan hasil fusi dari partai-partai yang berhaluan nasional. Kemudian yang ketiga Golongan Karya yang merupakan fusi dari berbagai kekuatan organisasi masyarakat yang ada sebelumnya.¹⁷

Hasil dari beberapa pemilu yang dilakukan pada masa orde baru, partai Golkar dengan mutlak memenangkan hasil pemilunya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran “deparpolisasi” Soeharto setelah diangkat menjadi presiden. Pada 6 kali pemilu di masa orde baru, terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi. Banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pemilu yang justru dianggap lebih memihak pada salah satu partai, dan merugikan partai yang lain.¹⁸

Kejatuhan orde baru dan dimulainya era reformasi menjadi awal tahapan yang baru untuk membuka ruang politik, hukum, dan ekonomi yang selama lebih dari tiga decade terkekang. Pemilu pertama era reformasi dilakukan pada 7 Juni 1999. Pada pemilu ini terjadi euphoria kepartaian sebagai akibat dari kebijakan politik yang terkekang selama puluhan tahun.¹⁹

Kemudian, pemilu kedua yang dilaksanakan pada era reformasi yaitu pada tahun 2004. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang dimana rakyat dapat memilih

¹⁷ Hafied Cangara, *loc. cit.*, hlm. 198.

¹⁸ Ibnu Tri Cahyono, *loc. cit.*, hlm. 34-37, 52.

¹⁹ Ibnu Tri Cahyono, *ibid.*

secara langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD dan presiden serta wakil presiden. Adanya peraturan pemilu yang baru tersebut, maka euphoria pemilu menjadi lebih berbeda dari sebelumnya, karena setiap partai yang dapat maju dalam pemilihan tersebut juga bisa memilih calon presiden dan wakil presiden dari partainya sendiri. Hal tersebut berlaku di setiap provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Jawa Barat sebagai provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat menjadi bagian penting dari sebuah proses demokrasi dalam hal ini khususnya adalah pemilu, partisipasi politik di Jawa Barat menjadi satu bagian penting sebagai kontrol dan juga legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan.²⁰ Pada pemilu 2004 sendiri wilayah Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Timur yang terdiri dari 26.506.670 pemilih.²¹

Adanya pelaksanaan pemilu 2004 ini tentunya tidak terlepas dari peranan media massa sebagai salah satu penyebar informasi kepada masyarakat luas. Dalam hal pelaksanaan pemilu 2004 ini, media memiliki peranan dalam memberitakan bagaimana proses pemilu 2004 berlangsung di Jawa Barat. Salah satu media yang dengan rutin memberitakan pemilu 2004 ini adalah surat kabar

²⁰ Leo Agustino, dkk, *Kajian Analisa Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Tahun 2022*, (Jawa Barat: Kesbangpol Jawa Barat, 2022), hlm. 2-3.

²¹ Data Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS Setiap Provinsi Dalam Pemilihan Umum 2004, (Lampiran Keputusan KPU, 2004)

Galamedia. Surat kabar ini adalah surat kabar yang identik dengan kabar lokal Jawa Barat.

Sejak tahun 2003, surat kabar Galamedia ini dengan rutin mulai memberitakan proses terkait pemilu 2004, dan juga menampilkan bagaimana opini yang muncul dari masyarakat lokal Jawa Barat terkait isu pemilu 2004 ini. Surat kabar Galamedia juga tidak lupa menampilkan arahan dari para tokoh agama dalam menghadapi pemilu 2004 ini. Hingga menjelang akhir 2004 dimana pemilu 2004 selesai dilaksanakan, dan hasil pemilu 2004 sudah diketahui, surat kabar Galamedia ini masih dengan konsisten memberitakannya.

Hasil pemilu 2004 untuk pilpres dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang dilantik pada 20 Oktober 2004. Sedangkan dalam pemilihan legislatif khususnya di daerah Jawa Barat, terdapat 24 partai politik yang berpartisipasi dan muncul partai golongan karya sebagai partai dengan peraih suara terbanyak di Jawa Barat khususnya tingkat DPRD Provinsi, yaitu sekitar 5.777.935 suara. Partai kedua yang mendapatkan suara terbanyak di Jawa Barat adalah Partai Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sebanyak 3.640.703 suara. Kemudian, partai ketiga dengan jumlah suara terbanyak didapatkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan sekitar 2.407.982 suara.²² Semua proses pemilu ini hingga akhir kemudian diberitakan kepada masyarakat luas, khususnya di daerah Jawa Barat.

²² Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Provinsi Jawa Barat. (KPU Provinsi Jawa Barat, 2003)

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait “*Pemilu 2004 Di Jawa Barat Dalam Pemberitaan Surat Kabar Galamedia Tahun 2003-2004*”. Penulis memilih peristiwa pemilu 2004 sebagai peristiwa yang diteliti, karena pemilu 2004 merupakan suatu yang baru dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Pemilu 2004 menjadi transisi dalam pelaksanaan pemilu yang jauh lebih demokratis dari beberapa pemilu yang dilakukan sebelumnya. Rakyat rakyat bisa secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden yang mereka anggap mampu untuk memimpin Indonesia.

Alasan kenapa penulis memilih daerah Jawa Barat, karena penulis ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemilu di Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kemudian, alasan penulis memilih surat kabar Galamedia, karena surat kabar Galamedia merupakan salah satu surat kabar yang memang lebih banyak memfokuskan penulisan berita di daerah Jawa Barat. Surat kabar Galamedia identik dengan surat kabar yang biasa ada di kepolisian. Oleh karena itu, penulis memilih surat kabar Galamedia karena dalam penelitian ini, penulis hanya akan mengambil terkait permasalahan pemilu 2004, yang tidak terlepas dari adanya pelanggaran pemilu yang ditangani oleh kepolisian. Selain itu alasan penulis memilih surat kabar galamedia, adalah karena surat kabar Galamedia tidak terlalu banyak digunakan sebagai media kampanye jika dibandingkan dengan surat kabar lain di Jawa Barat, seperti Pikiran Rakyat ataupun Tribun Jabar, sehingga lebih meminimalisir ketidaknetralan.

Terkait alasan penulis memilih tahun 2003 adalah karena pada tahun tersebut berbagai tahapan-tahapan pemilu mulai banyak dilakukan, dan penulis memilih dari tanggal 1 April 2003, dimana pada tanggal tersebut mulai dibentuk tim seleksi untuk calon anggota KPU. Kemudian alasan penulis membatasi sampai tahun 2004 adalah karena pemilu ini dilaksanakan pada tahun 2004 dan pada tahun 2004 sendiri, secara resmi para calon yang terpilih dalam pemilu dilantik dan mulai menjabat di tahun 2004, tepatnya pada bulan Oktober dimana Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu 2004 dilantik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, penulis berfokus pada dua rumusan masalah, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Gambaran Umum Pemilu 2004 dan Kondisi Menjelang Pemilu 2004?
2. Bagaimana Pemberitaan Surat Kabar Galamedia Tahun 2003-2004 tentang Pemilu 2004 di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, penulis kemudian fokus pada dua tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Gambaran Umum Pemilu 2004 dan Kondisi Menjelang Pemilu 2004
2. Untuk Mengetahui Pemberitaan Surat Kabar Galamedia Tahun 2003-2004 tentang Pemilu 2004 di Jawa Barat

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pemilu 2004 di Jawa Barat dalam Pemberitaan Surat Kabar Galamedia Tahun 2003-2004”, penulis terinspirasi dari beberapa penelitian skripsi yang penulis dapatkan dari digital library beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Skripsi tersebut antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Victor A. Simanjuntak yang berjudul “*Kampanye Politik: Studi Atas Pemberitaan Kampanye Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2004 di Surat Kabar Republika*”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun sama-sama meneliti tentang peristiwa pemilu 2004, namun surat kabar yang diteliti berbeda, dimana skripsi ini menggunakan surat kabar Republika, sedangkan peneliti menggunakan surat kabar Galamedia.
2. Skripsi Diaz Angga Fadhlurrahman dari program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta yang berjudul “*Pemberitaan Calon Presiden Dan Wakil Presiden di Media Massa Koran Kompas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2004*”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun sama-sama meneliti tentang peristiwa pemilu 2004, namun penelitian ini lebih focus pada pemberitaan calon presiden dan wakil presidennya, sedangkan penulis berfokus pada permasalahan yang terjadi pada pemilu 2004. Selain itu, surat kabar yang diteliti berbeda dimana skripsi ini menggunakan surat kabar Kompas, sedangkan peneliti menggunakan surat kabar Galamedia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nuraini Almutaallimah, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung berjudul “*Politik Media: Analisis Perbandingan Pemberitaan Koran Kompas, Suara Karya Dan Berita Dalam Peristiwa 15 Januari 1974*”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena pada skripsi ini peristiwa yang diteliti adalah mengenai Peristiwa 15 Januari 1974 sedangkan penulis meneliti tentang peristiwa pemilu 2004.

E. Metode Penelitian

Dalam prosesnya, penulis memerlukan metode penelitian sejarah untuk dapat menyelesaikan penelitian mengenai topic kajian ini. Metode Penelitian Sejarah terdiri atas empat tahapan, *pertama* pengumpulan sumber atau heuristik, *kedua* tahapan kritik sumber, *ketiga* interpretasi dan *keempat* historiografi.

1. Heuristik

Dalam tahapan ini, penulis berusaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah sendiri, adalah semua warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran, baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia sejak zaman prasejarah sampai sekarang.²³ Adapun tempat yang penulis kunjungi diantaranya adalah Perpustakaan UIN Bandung, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat.

²³ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 95.

Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dapat digolongkan menjadi sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat peristiwa bersejarah dengan mata kepala sendiri ataupun panca indra yang lain, atau alat mekanis yang ada pada saat itu, dan harus sezaman dengan peristiwa yang dikisahkan.²⁴ Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber sejarah berupa tulisan, yaitu surat kabar utama yaitu surat kabar Galamedia dan beberapa sumber lainnya sebagai sumber primer. Adapun untuk sumber sekunder, penulis hanya menyantumkan beberapa sumber, dari sekian sumber yang penulis temukan. Beberapa sumber tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Sumber Primer

1.) Surat Kabar

- i. Surat Kabar Galamedia Periode Tahun 2003 yang sudah di jilid per edisi tiap bulan, oleh Perpustakaan Deposit, DISPUSIPDA Jawa Barat.
- ii. Surat Kabar Galamedia Periode Tahun 2004 yang sudah di jilid yang sudah di jilid dengan edisi per tiap bulan, oleh DISPUSIPDA Jabar.

2.) Arsip dalam bentuk PDF

- i. Keputusan KPU No. 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi Dan Penetapan Keanggotaan KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang berbentuk file pdf yang didapatkan dari website regulasip.
- ii. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang didapatkan dari website resmi pemerintahan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan.

²⁴ Sulasman, *Ibid.*, hlm. 96.

3.) Data KPU Jawa Barat

- i. Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS setiap Provinsi dan Jawa Barat dalam Pemilihan Umum 2004. Arsip didapatkan dengan format file pdf dan Microsoft Excel.
- ii. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota. Arsip didapatkan dari KPU Provinsi Jawa Barat dan tersedia untuk seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.
- iii. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat KPU Provinsi.

4.) Buku

- i. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, “Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi”. Bandung: iDEA Publishing. Buku ini didapatkan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Sumber Sekunder

1.) Buku

- i. Ibnu Tricahyono, “Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal”, Malang: In-Trans Publishing, 2009.
- ii. Janedri M. Gaffar, “Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2013. Buku ini didapatkan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan bukunya terawat dengan baik dan sudah dibeli sampul plastik. Tulisan di buku ini masih dapat terlihat dengan jelas. Dengan hasil cetakan yang rapih dan baik, buku ini dapat dikatakan sebagai buku original, bukan bajakan.

2. Kritik

Tahapan selanjutnya adalah menyeleksi sumber, yang disebut dengan tahapan kritik. Proses kritik meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan internal.²⁵ Dalam tahap ini, sumber utama yang akan penulis verifikasi adalah sumber-sumber yang digolongkan ke dalam sumber primer, yaitu surat kabar Galamedia, arsip kpu, arsip Undang-Undang, serta buku-buku yang digolongkan kedalam sumber primer.

a. Kritik Ekstern.

Kritik ekstern merupakan kritik yang dilakukan untuk mengetahui autentisitas atau keaslian sumber yang dilihat dari aspek-aspek luarnya. Sumber sejarah adalah autentik atau asli jika benar-benar merupakan produk dari orang yang dianggap sebagai pemiliknya atau jika itu yang dimaksudkan oleh pengarangnya.²⁶

1.) Sumber Primer

a.) Surat Kabar

- i. Surat Kabar Galamedia Periode Tahun 2003. Surat kabar ini didapatkan penulis dari Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Surat kabar tersebut masih utuh halamannya, namun di beberapa bagian tertentu sudah beberapa bagian yang robek. Kertasnya sudah banyak yang kotor dan menguning. Serta ada beberapa edisi Koran yang bagian sampingnya terpotong.
- ii. Surat Kabar Galamedia Periode Tahun 2004 yang sudah di jilid oleh DISPUSIPDA Jawa Barat. Surat kabar tersebut masih utuh

²⁵ Sulasman, *ibid.*, hlm. 101.

²⁶ Sulasman, *ibid.*, hlm. 102-103.

halamannya, namun di beberapa bagian tertentu sudah beberapa bagian yang robek. Kertasnya sudah banyak yang kotor dan menguning. Serta ada beberapa edisi Koran yang bagian sampingnya terpotong.

b.) Arsip dalam bentuk PDF

- i. Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi Dan Penetapan Keanggotaan KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang berbentuk file pdf yang didapatkan dari website regulasip. File pdf ini, tulisannya masih terlihat dengan jelas, sehingga tidak menyulitkan penulis untuk dapat memahami isinya.
- ii. UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, yang didapatkan dari website resmi pemerintahan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan. Sama seperti sumber Undang-Undang yang lainnya, file pdf yang tersedia di website resmi pemerintah ini, tulisannya masih terlihat dengan jelas, sehingga tidak menyulitkan penulis untuk dapat memahami isinya.

c.) Data KPU

- i. Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS setiap Provinsi dan Jawa Barat dalam Pemilihan Umum 2004. Arsip didapatkan dari KPU Jawa Barat dengan format file pdf dan Microsoft Excel. Data dari KPU ini, untuk yang berbentuk pdf memang ada beberapa bagian yang kurang terlihat jelas, namun terdapat data versi Micosoft Excel, sehingga memudahkan penulis untuk memahami isinya.

ii. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota. Arsip didapatkan dari KPU Provinsi Jawa Barat dan tersedia untuk seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Data dari KPU ini, untuk yang berbentuk pdf memang ada beberapa bagian yang kurang terlihat jelas, namun terdapat data versi Micosoft Excel, sehingga memudahkan penulis untuk memahami isinya.

iii. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat KPU Provinsi. Arsip didapatkan dari KPU Provinsi Jawa Barat. Data dari KPU ini, untuk yang berbentuk pdf memang ada beberapa bagian yang kurang terlihat jelas, namun terdapat data versi Micosoft Excel, sehingga memudahkan penulis untuk memahami isinya.

d.) Buku

- i. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, “Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi”, iDEA Publishing. Buku ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan bukunya terawat dengan baik dan sudah dibeli sampul plastik, dan tulisannya masih dapat terlihat dengan jelas. Dengan tulisan timbul pada bagian covernya, buku ini dapat dikatakan sebagai buku original, bukan bajakan.

2.) Sumber Sekunder

a.) Buku

- i. Ibnu Tricahyono, “Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal”, Malang: In-Trans Publishing, 2009. Buku ini

penulis dapatkan dari Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan bukunya terawat dengan baik dan sudah dibeli sampul plastik. Tulisan di buku ini masih dapat terlihat dengan jelas. Dengan hasil cetakan yang rapih dan baik, buku ini dapat dikatakan sebagai buku original, bukan bajakan.

- ii. Janedri M. Gaffar, “Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2013. Buku ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan bukunya terawat dengan baik dan sudah dibeli sampul plastik. Tulisan di buku ini masih dapat terlihat dengan jelas. Dengan hasil cetakan yang rapih dan baik, buku ini dapat dikatakan sebagai buku original, bukan bajakan.

b. Kritik Intern

Kritik internal disebut juga dengan pengujian kredibilitas sumber. Dalam tahapan ini sumber sumber yang sudah didapatkan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kritik eksternal menekankan aspek “dalam”, yaitu “isi” dari sumber: kesaksia (testimoni).²⁷

1.) Sumber Primer

a.) Surat Kabar

- i. Surat Kabar Galamedia Periode Tahun 2003 yang sudah di jilid oleh Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Surat kabar ini berisi tentang berbagai macam tema berita, khususnya di daerah

²⁷ Sulasman, *Ibid.*, hlm. 104.

Jawa Barat. Namun, ada juga tema berita nasional yang dimuat dalam surat kabar ini. Dalam surat kabar ini, banyak kabar mengenai politik, termasuk mengenai pelaksanaan pemilu yang akan dilakukan pada tahun 2004. Namun, karena surat kabar ini adalah surat kabar yang banyak berisi tentang berita Jawa Barat, maka berita pemilu 2004 juga banyak yang berlatarkan daerah Jawa Barat, seperti Bandung, Ciamis, Purwakarta, dan lain-lain.

ii. Surat Kabar Galamedia Periode Tahun 2004 yang sudah di jilid oleh Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Surat kabar ini berisi tentang berbagai macam tema berita, khususnya di daerah Jawa Barat. Namun, ada juga tema berita nasional yang dimuat dalam surat kabar ini. Dalam surat kabar ini, banyak kabar mengenai politik, termasuk mengenai pelaksanaan pemilu yang akan dilakukan pada tahun 2004.

b.) Arsip dalam bentuk PDF

- i. Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi Dan Penetapan Keanggotaan KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang berbentuk file pdf yang didapatkan dari website regulasip. Isi dari Undang-Undang ini dapat dipastikan kredibilitasnya, penulis sudah membandingkan dengan sumber lain yang terpercaya, dan dilengkapi dengan skkpu.
- ii. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang didapatkan dari website resmi pemerintahan, yaitu

Badan Pengawasan Keuangan. Isi dari Undang-Undang ini dapat dipastikan kredibilitasnya, karena berasal dari website resmi pemerintah, dan juga penulis sudah membandingkan dengan sumber lain yang terpercaya, yaitu website resmi KPU.

c.) Data KPU

- i. Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS setiap Provinsi dan Jawa Barat dalam Pemilihan Umum 2004. Data ini dapat dipastikan kredibilitasnya, karena berasal dari sumbernya langsung yaitu KPU. Selain itu, isinya juga sudah dibandingkan dengan sumber yang lainnya.
- ii. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota. Arsip didapatkan dari KPU Provinsi Jawa Barat dan tersedia untuk seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Data dari KPU ini dapat dipastikan kredibilitasnya, karena berasal dari sumbernya langsung yaitu KPU.
- iii. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat KPU Provinsi. Arsip didapatkan dari KPU Provinsi Jawa Barat. Data dari KPU ini dapat dipastikan kredibilitasnya, karena berasal dari sumbernya langsung yaitu KPU.

d.) Buku

- i. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, “Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi”, iDEA Publishing. Buku ini berisi tentang hal-hal yang terkait dengan proses pemilu 2004, yang ditulis oleh salah satu anggota KPU Jawa Barat

periode 2004-2009. Selain itu, penulis buku ini merupakan anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2004.

2.) Sumber Sekunder

a.) Buku

- i. Ibnu Tricahyono, “Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal”, Malang: In-Trans Publishing, 2009. Buku ini juga berisi tentang bagaimana sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia dari masa orde lama hingga ke reformasi. Penulis merupakan seorang lulusan S3 fakultas hukum, yang berfokus pada Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah. Buku ini menggunakan banyak sumber-sumber terpercaya dalam penulisannya, seperti buku yang dikeluarkan oleh LIPI, Undang-Undang, dan artikel lainnya.
- ii. Janedri M. Gaffar, “Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2013. Buku ini berisi tentang pembahasan negara demokrasi dan konstitual. Selain itu, dalam buku ini juga dijelaskan tentang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia dan penyelesaian sengketa pemilu.

3. Interpretasi

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan yang lainnya. Adanya interaksi tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor, seperti adanya faktor emosional, dimana manusia akan merasakan empati pada seseorang, adanya kebutuhan pribadi dimana orang tersebut

tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pribadinya jika hidup sendiri, selain itu juga adanya faktor lain seperti ingin mempertahankan eksistensi diri.²⁸

Salah satu bentuk interaksi sosial sendiri adalah terjadinya komunikasi. Kegiatan berkomunikasi selalu dilakukan oleh manusia, dimana pun, kapan pun dan kepada siapa saja.²⁹ Adanya kegiatan berkomunikasi ini menjadi salah satu simbol dari keberadaan kita dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara bahasa, komunikasi sendiri bahasa latin yaitu *kata communico* yang artinya membagi, atau kata *communis* yang artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.³⁰ Komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai proses untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Schram mengatakan bahwa untuk berlangsungnya suatu kegiatan komunikasi minimal diperlukan tiga komponen yang terdiri dari sumber atau komunikator, pesan, dan komunikan atau yang dituju. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan komunikasi.³¹

Pada awalnya, proses dalam berkomunikasi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu komunikasi antarpersona yang dilakukan dengan cara bertatap muka antara komunikator dan komunikannya dan komunikasi massa yang merupakan penyampaian pesan yang dikomunikasikan melalui media massa.³² Sebagai bagian

²⁸ A.S. Haris Sumadiria, *Sosiologi Komunikasi Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 1.

²⁹ A.S. Haris Sumadiria, *ibid.*

³⁰ Hafied Cangara, *loc. cit.*, hlm. 13.

³¹ Elvinaro Ardianto, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), hlm. 27.

³² Elvinaro Ardianto, *ibid.*, hlm. 2.

dari proses komunikasi, adanya komunikasi massa memberikan peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya komunikasi massa ini, semua pesan yang ingin disampaikan dapat segera tersampaikan dengan mudah, tanpa terbatas jarak dan waktu. Komunikasi massa sendiri sendiri harus dilakukan melalui media massa sebagai syarat utamanya.

Hingga saat ini, ada beberapa media massa yang tersedia sebagai media untuk melakukan komunikasi kepada khalayak ramai, diantaranya adalah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu media massa yang termasuk dalam kategori media cetak. Di Indonesia sendiri, perkembangan surat kabar memiliki perjalanan yang cukup panjang. Meskipun surat kabar ini pada awal keberadaannya berasal dari pihak Belanda, namun pada tahun-tahun berikutnya, masyarakat pribumi mampu mempergunakan keberadaan surat kabar dengan baik. Banyak masyarakat pribumi yang menulis di surat kabar dalam upaya membangkitkan kesadaran seluruh masyarakat pribumi dalam memperoleh kemerdekaan.

Kemudian, ketika Jepang menguasai Indonesia, Jepang melakukan penutupan terhadap peredaran media massa dan menggantinya dengan media massa lain yang berada dibawah pengawasan Jepang.³³ Setelah Indonesia merdeka, surat kabar dimasa orde lama masih digunakan sebagai alat untuk membakar semangat masyarakat pribumi, namun terbit juga beberapa surat kabar yang isinya adalah menyuarakan kepentingan partai, seperti surat kabar *Harian Indonesia Raya*, *Suluh Indonesia* dan beberapa surat kabar lainnya.³⁴

³³ Hafied Cangara, *loc. cit.*, hlm. 105.

³⁴ Hafied Cangara, *ibid.*, hlm. 106.

Selanjutnya dimasa orde baru, keberadaan pers dalam hal ini khususnya surat kabar, mengalami perubahan. Pada masa Soeharto, ia berusaha menghilangkan peredaran surat kabar yang memiliki konten-konten yang bersifat kritis dan kontroversial. Selain itu, pemerintahan orde baru juga mengeluarkan kebijakan mengenai Surat Izin Terbit dengan tujuan agar pemerintah dapat mengontrol informasi yang beredar di masyarakat. Pada masa itu, kebebasan surat kabar untuk menghadirkan berbagai berita menjadi terbatas. Namun, setelah kejatuhan orde baru berbagai aturan yang membatasi Pers dihapuskan, hal itu sesuai dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, Pers dalam hal ini khususnya surat kabar, kembali memiliki kebebasan dan keberanian untuk menampilkan berita mengenai berbagai peristiwa yang sedang hangat terjadi di tanah air.

Surat kabar Galamedia sendiri merupakan salah satu media pers dalam bentuk cetak yang sudah ada sejak lama. Awalnya, surat kabar ini muncul dari izin terbit Majalah Sunda Tjampaka yang diterbitkan oleh CV. Tjampaka.³⁵ Kemudian badan penerbitnya diserahkan kepada Syamsyar Adnan pada 1968, yang kemudian mengubah majalah tersebut menjadi surat kabar dengan nama Kabar Mingguan Gala, yang ditandai sebagai berdirinya PT. Galamedia Bandung Perkasa.³⁶ Kemudian, setelah PT. Surya Persindo memberikan sahamnya kepada Gala, pada

³⁵ Desi Darwati, Tinjauan Atas Analisis Sumber Dan Penggunaan Kas Pada PT. Galamedia Bandung Perkasa, (Universitas Widayatama, 2015), hlm. 1.

³⁶ Surat Kabar Galamedia, Edisi September 2004.

14 Oktober 1999 Pikiran rakyat membeli Gala dan namanya berubah menjadi Harian Umum Galamedia.³⁷

Harian Umum Galamedia mengkhususkan tema pemberitaannya pada berita lokal di Bandung, dan menambahkan berita lainnya adalah sebagai pelengkap. Surat kabar Galamedia juga tidak lupa untuk memberitakan mengenai perkembangan perpolitikan di Jawa Barat. Salah satu berita yang ditayangkan tersebut adalah berita mengenai proses pemilu 2004. Terlebih lagi, pemilu 2004 adalah pertama kalinya rakyat bisa memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya. Hal tersebut menjadikan perhatian masyarakat pada pemilu 2004 ini menjadi lebih besar dari pemilu sebelum-sebelumnya. Surat kabar Galamedia secara rutin mulai memberitakan pemilu 2004 setiap bulannya sejak tahun 2003. Surat kabar ini menampilkan berita mengenai bagaimana pemilu 2004 dari mulai proses pendaftaran para calonnya, hingga berita pelantikan secara resmi pada tahun 2004.

Berdasarkan penjelasan tentang “Pemilu 2004 dalam Pemberitaan Surat Kabar Galamedia Tahun 2003-2004”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *agenda setting*. Teori *agenda setting* ini dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald L Shaw pada tahun 1972, yang dijelaskan dalam artikel yang berjudul “*The Agenda Setting Function of Mass Media*” yang dipublikasikan dalam jurnal *Public Opinion Quarterly*.³⁸ Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa

³⁷ A Muhamad Gifari, Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Harian Umum Galamedia Bandung, diakses dari <https://repository.unikom.ac.id/17801/pada> 25 November 2023, hlm. 1-5

³⁸ Hafied Cangara, *op. cit.*, hlm. 101.

jika media memberikan penekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.³⁹ Menurut teori ini, media massa khususnya media berita selalu mengarahkan kepada kita apa yang harus kita lakukan.

Kaitan teori komunikasi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah karena dalam surat kabar galamedia edisi tahun 2003-2004 ini, secara rutin memberitakan tema seputar pemilu 2004, bukan hanya terkait proses menjelang pemilu 2004 seperti alur pendaftaran atau bahkan perkembangan para calon di pemilu 2004 saja, namun dalam surat kabar galamedia ini juga banyak konten-konten seputar pemilu 2004 seperti opini dan ajakan kepada para pembaca dan untuk bisa lebih bijak lagi dalam menentukan siapa yang akan dipilih pada pemilu 2004 tersebut. Bahkan, dalam surat kabar galamedia edisi 2003-2004 ini, juga memuat konten-konten dari tokoh agama, agar masyarakat tidak berpecah belah meskipun keadaan perpolitikan semakin memanas menjelang pemilu 2004.

4. Historiografi

Tahapan selanjutnya dalam metode penelitian sejarah, dikenal dengan historiografi. Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah.⁴⁰ Adapun rencana sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Di dalamnya penulis membahas mengenai Latar

³⁹ Hafied Cangara, *ibid.*

⁴⁰ Sulasman, *op.cit.*, hlm. 147.

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, serta Metode Penelitian yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Bab II adalah bab dengan judul Gambaran Umum Pemilu 2004 dan Proses Menjelang Pemilu 2004. Bab II ini terdiri dari beberapa subbab, diantaranya: Pelaksanaan Pemilu 2004, Lembaga Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu 2004, Indonesia Menjelang Pemilu 2004, dan Jawa Barat Menjelang Pemilu 2004.

Bab III adalah bab dengan judul Pemilu 2004 di Jawa Barat dalam Pemberitaan Surat Kabar Galamedia 2003-2004. Bab III ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: Pemberitaan Pemilu 2004 dalam Surat Kabar Galamedia Tahun 2003-2004, Amanat Para Tokoh Agama Terkait Pemilu 2004 dalam Surat Kabar Galamedia, serta Respon Umat Islam Terkait Pemilu 2004 dalam Surat Kabar Galamedia

Kemudian untuk Bab IV yaitu penutup yang terdiri dari dua subbab, yaitu bagian kesimpulan, dan saran.

